



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 April 2023

Nomor : 54/TuakaBin/IV/2023
Hal : Undangan Webinar Perayaan Hari Perempuan Internasional, Hari Hakim Perempuan Internasional dan Hari Kartini 2023

Kepada:

1. YM. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
2. YM. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI
3. Yth. Hakim Tinggi Pemilah Perkara
4. Yth. Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI
5. Yth. Ketua Pengadilan, Hakim dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding pada seluruh lingkungan badan peradilan di seluruh Indonesia
6. Yth. Ketua Pengadilan, Hakim dan Hakim Ad Hoc pada seluruh lingkungan badan peradilan di seluruh Indonesia

Peningkatan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung untuk mewujudkan keberagaman dan akses keadilan yang lebih kuat untuk perempuan dan anak perempuan. Komposisi hakim yang beragam dapat memastikan pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan yang akan membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung.

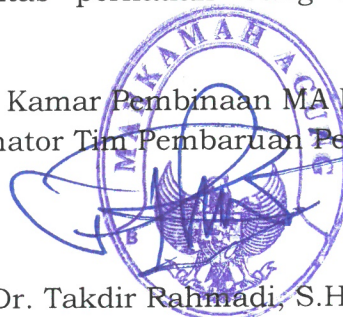
Dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April), Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) yang didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) akan menyelenggarakan webinar dengan topik “Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan di Pengadilan” yang akan dilaksanakan secara *hybrid* di Gedung Mahkamah Agung RI dan melalui Zoom.

Untuk itu diharapkan Yang Mulia serta Bapak/Ibu sekalian, untuk mengikuti webinar ini melalui Zoom dengan detail sebagai berikut:

Hari, tanggal : Jumat, 14 April 2023
Waktu : 09.00 – 11.05 WIB
Link Zoom : [https://us02web.zoom.us/j/89715226501?](https://us02web.zoom.us/j/89715226501?pwd=blpYS1dmdkZjYnV2T1lzVmhDTm1tUT09)
pwd=blpYS1dmdkZjYnV2T1lzVmhDTm1tUT09
Meeting ID: 897 1522 6501
Passcode: 979423

Demikian disampaikan undangan ini. Atas perhatian Yang Mulia serta Bapak/Ibu/Sdr/i diucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan MA RI /
Koordinator Tim Pembaruan Peradilan



Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Kerangka Acuan Webinar Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan di Pengadilan

Memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Hari Hakim Perempuan Internasional 10 Maret, dan Hari Kartini 21 April 2023

*Bayangkan dunia yang setara gender.
Dunia yang bebas dari bias, stereotip, dan diskriminasi.
Dunia yang beragam, adil, dan inklusif.
Dunia di mana perbedaan dihargai dan dirayakan.
Bersama-sama kita bisa menempa kesetaraan perempuan.
Secara kolektif kita semua bisa #EmbraceEquity.
Rayakan prestasi wanita.
Meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi.
Mengambil tindakan untuk mendorong kesetaraan gender.
IWD milik semua orang, di mana saja.
Inklusi berarti semua tindakan IWD valid.*

A. Pendahuluan

Peningkatan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung untuk mewujudkan keberagaman dan akses keadilan yang lebih kuat untuk perempuan dan anak perempuan. Mahkamah Agung Republik Indonesia selama ini telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perspektif keadilan gender serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak (Pokja Perempuan dan Anak) melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 43/KMA/SK/IV/2015. Pembentukan Pokja Perempuan dan Anak tersebut merupakan langkah pertama Mahkamah Agung untuk membuktikan komitmennya untuk perlindungan yang lebih kuat atas hak perempuan dan anak perempuan dalam peradilan. Sejumlah kemajuan untuk penguatan akses keadilan bagi perempuan kemudian berhasil dicapai melalui kelompok kerja ini dengan dikeluarkannya kebijakan yang melindungi hak Perempuan dan anak seperti Perma No. 3 Tahun 2017, Perma No. 5 Tahun 2019, serta Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Selain dalam bentuk kebijakan, perlindungan hak perempuan yang lebih kuat juga telah ada dalam bentuk putusan pengadilan. Misalnya, putusan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) pada Kamar Agama MA RI dalam perkara waris, di mana perempuan dapat memperoleh hak warisan dari orang tua mereka dengan porsi yang sama dengan porsi saudara laki-laki. Atau dalam perkara perceraian, di mana hakim dapat menambahkan kalimat dalam amar putusan cerai gugat, bahwa pengambilan akta cerai hanya dapat dilakukan setelah mantan suami memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak mantan isteri. Sebelumnya, banyak



terjadi para mantan suami tidak memenuhi hak-hak mantan isteri sebagaimana ditetapkan dalam putusan karena telah dapat mengambil akta cerainya terlebih dahulu. Namun demikian, upaya MA-RI dalam meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hak perempuan juga perlu diiringi dengan peningkatan kesetaraan gender dalam internal organisasi dan kelembagaan MA-RI, terutama peran kepemimpinan hakim perempuan di Pengadilan.

1. Upaya Meningkatkan Representasi dan Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan

Peningkatan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung untuk mewujudkan keberagaman dan akses keadilan yang lebih kuat untuk perempuan dan anak perempuan. Komposisi hakim yang beragam dapat memastikan pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Hal ini juga sesuai dengan Tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDG) khususnya Tujuan ke-5 dan 16, yang merujuk pada tanggung jawab global untuk kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik, termasuk peradilan.

Sejak tahun 2022, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI mulai melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia. Inisiatif ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Memantau komposisi jumlah hakim perempuan serta jumlah hakim perempuan yang menduduki jabatan kepemimpinan di seluruh tingkatan dan lingkungan peradilan di Indonesia.
- b. Dialog internasional dengan topik Peningkatan Hakim Perempuan pada tanggal 15 April 2021 dan 21 April 2022 secara hybrid dengan mengundang narasumber dari Australia, Malaysia, New Zealand dan Pakistan dan yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung RI, untuk mendiskusikan tantangan dan berbagai pendekatan yang bisa diambil pengadilan dalam meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan.
- c. Melakukan survei persepsi terhadap hakim di seluruh lingkungan peradilan tentang peningkatan peran dan kepemimpinan hakim perempuan.

B. Tujuan Webinar

Dalam rangka merayakan hari Perempuan internasional, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Federal Circuit and Family Court of Australia, didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) akan melakukan webinar yang melibatkan pimpinan, hakim agung serta narasumber dari Asosiasi Internasional yang berfokus pada peningkatan kepemimpinan perempuan untuk berbagi pencapaian, pengalaman, tantangan dan harapan untuk peningkatan kepemimpinan dan representasi hakim perempuan yang lebih baik. Dialog akan difokuskan mengenai usaha bersama untuk pengadilan yang lebih beragam #EmbraceEquity, merayakan pencapaian peningkatan peran kepemimpinan hakim perempuan serta mengambil tindakan untuk mendorong kesetaraan gender. Dialog ini juga akan membahas mengenai bagaimana hasil survey persepsi tentang peningkatan kepemimpinan



hakim perempuan di pengadilan yang dilaksanakan pada Maret-April 2022, digunakan oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan.

C. Agenda Webinar

Webinar ini akan diadakan pada hari **Jum'at, 14 April 2022 jam 09.30-11.05 WIB** secara online yang bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Hari Hakim Perempuan Internasional 10 Maret, dan Hari Kartini 21 April. Rangkaian acara dialog internasional ini adalah sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
09.30-09.32	Pembukaan dari MC
09.32-09.35	Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI
09.35-09.40	<i>Opening remarks</i> dari Kedutaan Australia (DFAT)
09.40-09.50	Keynote Speech: YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial,
09.50-09.55	Pengantar oleh Moderator (Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.)
09.55-10.10	YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Hambatan dan Tantangan Hakim Perempuan di Indonesia
10.10-10.20	Michelle Ryan, Director of Global Institute for Women's Leadership Using Evidence to Advance Equality for Women
10.20-10.40	Penanggap: 1. H. Bambang Myanto, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI 2. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 3. Dr. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau 4. The Hon. Justice Suzanne Christie, Federal Circuit and Family Court of Australia
10.40-11.00	Tanya Jawab
11.00-11.05	<i>Closing Remarks</i> YM. Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI/Koordinator Tim Pembaruan Peradilan